

Struktur APBD Terhadap Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara

<sup>1</sup>Indy Tiffany Panjaitan, <sup>2</sup>Nissa Nur Ramadhani Br. Sibarani, <sup>3</sup>Syaiful Abdi Ritonga

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email : [indytiffany67385@gmail.com](mailto:indytiffany67385@gmail.com), [ramadhanisanur@gmail.com](mailto:ramadhanisanur@gmail.com),  
[syaifulabdi90@gmail.com](mailto:syaifulabdi90@gmail.com)

Corresponding Mail Author: [indytiffany67385@gmail.com](mailto:indytiffany67385@gmail.com)

---

**Abstract** : Abstract this study aims to evaluate whether the Medan city government has used the budget economically, efficiently, and effectively (value for money), then the budget analysis on regional spending, among others, to determine the occurrence of variance spending, the difference or the difference between the realization of spending with the budget. To determine the growth rate of spending, the development of spending from year to year. To determine the Harmony of spending or balance between spending in the budget function as a means of distribution, allocation and stabilization by the Medan City Government. To measure the level of efficiency of the use of the Medan city government budget in realizing regional spending.. The Data collected and used in this study are secondary data obtained from official documents, namely budget realization reports relating to the budget performance of the Medan City Government from 2016 to 2020 obtained from the Medan City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD).

**Keywords:** Budget, Regional Finance, Economic Growth.

---

## I. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut Priyo Hari Adi (2006) pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan

Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat

mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Mahmudi (2010:142) Analisis Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah Kota Medan daerah telah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis, efisien dan efektif. Analisis Varians Belanja memberikan informasi perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis Pertumbuhan Belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis keserasian belanja akan memberikan informasi tentang keseimbangan antar belanja. Rasio Efisiensi Belanja memberikan informasi perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja sedangkan Rasio Belanja 3 Daerah terhadap PDRB akan menunjukkan produktivitas dan efisiensi belanja daerah.

Berikut ini disajikan mengenai Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Medan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Medan

Tahun	Anggara Belanja (Milyar Rupiah)			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase (%)
2016	5.380,36	4.525,23	855,13	84%
2017	5.493,56	4.395,83	1.097,73	80%
2018	5.451,09	4.215,00	1.236,09	77%
2019	6.134,66	5.060,73	1.073,93	82%
2020	6.188,22	3.993,25	2.194,97	65%

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja pada Pemerintah Kota Medan. Pada tahun 2016 anggaran belanja Pemerintah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp.5.380,36 dengan terealisasi sebesar Rp.4.525,23 terdapat selisih kurang sebesar Rp.855,13 dengan persentase sebesar 84%. Pada tahun 2017 anggaran belanja pada Pemerintah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp.5.493,56 dengan terealisasi sebesar Rp.4.395,83 terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp 1.097,73 dengan persentase 80%. Kemudian pada tahun 2018 anggaran belanja Pemerintah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp.5.451,09 dengan terealisasi belanja sebesar Rp. 4.215,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp.1.236,09 dengan persentase 77%. Pada tahun 2019 anggaran belanja Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 6.134,66 dengan terealisasi sebesar Rp. 5.060,73 terdapat selisih kurang sebesar Rp.1.073,93 dengan persentase 82%. Pada tahun 2020 anggaran belanja sebesar Rp. 6.188,22 dengan terealisasi sebesar Rp. 3.993,25 terdapat selisih kurang sebesar Rp.2.194,97 dengan persentase 65%.

Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja Pemerintah Kota Medan yang ditetapkan tidak terealisasi secara menyeluruh karena realisasi yang dicapai lebih kecil dari

yang dianggarkan. Dari data anggaran belanja Pemerintah Kota Medan dapat dilihat apakah anggaran dan realisasi belanja menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan kinerja yang telah dicapai. Analisis Belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi Pemerintah Kota Medan telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Maka mengambil judul “Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2016– 2020”.

## II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

### Landasan Teori

#### Akuntansi Sektor Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Dari sudut ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Menurut Indra Bastian (2005:15) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan tersebut seharusnya disajikan. Standar akuntansi pemerintah mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana melaporkannya. Apa saja yang harus dilaporkan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi lainnya diatur dalam standar akuntansi tersebut. (Penjelasan UU No.23 Tahun 2014). Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan laporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan (Mardiasmo, 2018).

Sampai dengan tahun 2003 standar akuntansi pemerintahan yang berlaku adalah SAP Berbasis Kas (cash basis), sedangkan pada periode tahun 2004 sampai dengan 2014 standar akuntansi pemerintahan yang berlaku adalah SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal (cash towards accrual basis). Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah SAP Berbasis Akruwal (accrual basis). SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### **Keuangan Daerah**

Mahmudi (2010:15) Pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisien dan efektivitas, transparan, dan akuntabel. Siklus Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan atau implementasi, pelaporan dan evaluasi kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

### **Belanja Daerah**

Mahmudi (2010:156). Belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa belanja atau bisa juga merupakan pengeluaran pembiayaan. Kedua jenis pengeluaran ini baik belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan sama-sama membutuhkan bukti pengeluaran kas. Perbedaannya adalah untuk pengeluaran pembiayaan membutuhkan bukti pendukung berupa bukti memorial dan perlu persetujuan DPRD.

### **Laporan Keuangan**

Pemerintah Daerah Menurut Ariefiansyah & Utami (2012:3). Laporan Keuangan adalah catatan keuangan mengenai aktivitas perusahaan atau organisasi selama kurun waktu tertentu (satu periode akuntansi/satu tahun) yang memperlihatkan kondisi pada kurun waktu dan dipergunakan sebagai informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan. Menurut peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan actor dan daerah selama satu periode. Sedangkan menurut Bastian (2010, h; 9) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Mahmudi (2011, h; 143) laporan keuangan merupakan output dari actor akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan

(Todaro:2006).Pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai penambahan output atau penambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun (Prasetyo, 2009). Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

### **Metode Penelitian**

#### **Desain Penelitian**

Penelitian sekarang difokuskan pada penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran secermat mungkin (jelas dan terperinci) mengenai aspek-aspek yang terkait suatu fenomena tertentu (Solimun dkk, 2017). Secara umum penelitian deskriptif sudah mengandung penelitian eksploratif. Penelitian sekarang berusaha menjelaskan secara sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan, terkait struktur APBD terhadap keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data penelitian berdasarkan cara pengukuran pada penelitian sekarang adalah data kuantitatif (metrik) dan berdasarkan tingkat (skala) pengukuran adalah skala rasio (Asra dan Rudiansyah, 2017). Pengumpulan data penelitian dengan mengakses sumber-sumber sekunder, seperti publikasi-publikasi resmi statistik yang disajikan oleh institusi BPS baik pada tingkat nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi yaitu Laporan Realisasi Anggaran yang berkaitan dengan kinerja anggaran Pemerintah Kota Medan tahun 2016 sampai 2020 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan serta data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka sebagai alat menganalisis. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi yaitu Laporan Realisasi Anggaran yang berkaitan dengan kinerja anggaran Pemerintah Kota Medan tahun 2016 sampai 2020 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.

#### **Alat Analisis**

Dalam penelitian ini penulis menganalisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan rumusan masalah dalam buku

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mahmudi (2010:156-166). Adapun tahap – tahapan alat analisis sebagai berikut:

Analisis Varians Belanja

Mahmudi (2010:157) Analisis Varians merupakan perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:157)

Analisis Pertumbuhan Belanja

Mahmudi (2010:160) Analisis Pertumbuhan Belanja mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode berikutnya. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja}_{Thn\ t} - \text{Realisasi Belanja}_{Thn\ t-1}}{\text{Realisasi Belanja}_{t-1}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:160)

**Analisis Keserasian Belanja**

Mahmudi (2010:162) Keserasian Belanja adalah keseimbangan antar belanja. Keserasian belanja bagi pemerintah daerah bermanfaat dalam mengalokasikan keseluruhan belanja sesuai dengan kebutuhan rencana kerja anggaran. Analisis keserasian belanja dapat berupa :

**Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja**

Analisis Belanja per Fungsi sangat penting untuk mengetahui pola dan orientasi pengeluaran pemerintah daerah. Rasio Belanja per Fungsi Terhadap Total Belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi...}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:162)

**Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja**

Mahmudi (2010:164) Analisis Belanja Operasi Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi.

$$\text{Rasio Belanja Operasi thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:164)

#### Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Mahmudi (2010:164) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio Belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:164)

#### Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Mahmudi (2010:165) Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian pengendalian anggaran. Rasio Belanja Langsung dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Langsung thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:165)

Sedangkan rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:166)

#### Rasio Efisiensi Belanja

Mahmudi (2010:166) Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:166)

### Rasio Belanja terhadap PDRB

Mahmudi (2010:166). Rasio Belanja terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rasio Belanja terhadap PDRB dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:166)

### Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan. Berikut rumus untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sadono Sukirno, 2004) :

$$Y \text{ (Laju Pertumbuhan Ekonomi)} = \frac{\text{PDB}_{rt} - \text{PDB}_{rt-1}}{\text{PDB}_{rt-1}} \times 100\%$$

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### Gambaran Umum Kota Medan

Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan letak wilayah pada posisi 30.30' LU-30.48' LU dan 98.39'BT-98.47'36"BT dengan ketinggian 0-40 meter di atas permukaan laut. Gindo Maraganti Hasibuan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Terpadu dalam Pengelolaan banjir di Kota Medan (Studi Kasus Banjir Kota Medan), Medan: 2005, hlm. 10 Posisi dan letak kota Medan berada di dataran pantai Timur Sumatera, persis di antara Selat Malaka dan jajaran pegunungan yang membujur dari Barat Daya sampai wilayah tenggara Pulau Sumatera menjadikan kota Medan daerah yang strategis baik untuk menjalankan roda perekonomian hingga pusat kebudayaan, Medan adalah tempat yang selalu terbuka bagi siapa saja yang memiliki kompeten dan kemampuan bertahan hidup sebagai orang kota. Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya serta kota terbesar di luar pulau Jawa.

Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 2020, kota Medan memiliki penduduk sebanyak 2.435.252 jiwa, dan kepadatan penduduk 9.522,22 jiwa/km<sup>2</sup>.

### Hasil Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2020 Pemerintah Kota Medan

Analisis belanja dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (Value For Money). Untuk Mencapai tujuan penelitian maka, dilakukan analisis belanja daerah yaitu mengetahui varians belanja, tingkat pertumbuhan belanja, tingkat keserasian belanja, tingkat efisiensi belanja dan tingkat belanja terhadap PDRB pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan.

#### Analisis Varians Belanja

Analisis Varians Belanja Tahun 2016 sebesar 84%, Pada Tahun 2017 sebesar 80%, dan Pada Tahun 2018 sebesar 77%, Pada Tahun 2019 sebesar 82%, Pada Tahun 2020 sebesar 65%. Varians Belanja Pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan adanya selisih kurang (bersaldo negatif) yang menunjukkan adanya efisiensi dan penghematan anggaran Pada Pemerintah Kota Medan.

Tabel 2. Analisis Varians Belanja

Tahun	Persentase
2016	84%
2017	80%
2018	77%
2019	82%
2020	65%

#### Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja tahun 2016 sebesar 19%. Pada tahun 2017 sebesar -3%. Kemudian Pada tahun 2018 sebesar -4%. Pada tahun 2019 kembali naik sebesar 20%. Pada tahun 2020 naik sebesar -21%. Dan selisihnya dari tahun 2016-2020 sangat banyak. Pertumbuhan Belanja dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan.

Tabel 3. Analisis Pertumbuhan Belanja

2016	842	0,185961819	19%
2017	-129,40	-0,028595232	-3%

2018	-180,83	-0,041136714	-4%
2019	845,73	0,200647687	20%
2020	-1067,48	-0,210933996	-21%

### Analisis Kecerassian Belanja

#### Analisis Belanja Per Fungsi

Rasio Belanja Per Fungsi tahun 2016 sampai tahun 2020 belanja daerah terealisasi 100%. Melaksanakan ketentuan perundangan seperti ketentuan Undang – Undang Dasar yang mengamankan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari total APBD, serta kecukupan tentang porsi anggaran kesehatan, lingkungan hidup dan perlindungan sosial. Sesuai dengan Belanja per fungsi Pendidikan Tahun 2016 sebesar 35,00%, Tahun 2017 sebesar 100%, Tahun 2018 sebesar 100,01%, Tahun 2019 sebesar 100%, Tahun 2020 sebesar 128,42%.

**Tabel 4. Analisis Belanja Per Fungsi**

Tahun	Persentase
2016	35%
2017	100%
2018	100,01%
2019	100%
2020	128,48%

#### Analisis Belanja Operasi

Rasio belanja operasi mengenai porsi belanja pemerintah Kota Medan pada tahun 2016 sebesar 30% dari total anggaran yang terpakai, pada tahun 2017 belanja operasi yang dipakai sebesar 35%. Pada tahun 2018 belanja operasi yang dipakai sebesar 39%. Pada tahun 2019 belanja operasi yang dipakai sebesar 41%. Pada tahun 2020 belanja operasi yang dipakai sebesar 49%. Nilai rata – rata rasio belanja operasi sebesar 39% dikatakan serasi karena kurang dari 100% maka penghematan anggaran berjalan dengan baik.

**Tabel 5. Analisis Belanja Operasi**

Tahun	Persentase
2016	30%
2017	35%
2018	39%
2019	41%
2020	49%

#### Analisis Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2016 yang digunakan sebesar 26% dari total belanja anggaran. Pada tahun 2017 yang digunakan sebesar 31% dari total belanja yang dianggarkan. Pada tahun 2018 yang digunakan sebesar 28%. Pada tahun 2019 yang digunakan sebesar

24%. Pada tahun 2020 yang digunakan sebesar 25%. Nilai rata – rata rasio belanja modal sebesar 27% dikatakan kurang serasi karena kurang dari 60%.

Tabel 6. Analisis Belanja Modal

Tahun	Persentase
2016	26%
2017	31%
2018	28%
2019	24%
2020	25%

#### Analisis Belanja Langsung dan Tidak langsung

Rasio proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada perhitungan rasio belanja langsung tahun 2016 sebesar Rp 3.176,03 dan belanja tak langsung sebesar Rp.2.204,29 dengan total belanja sebesar Rp.5.380,32 Persentase total belanja langsung yang digunakan sebesar 70% dan belanja tak langsung sebesar 49%.

Tabel 7. Analisis Belanja Langsung dan Tidak langsung

Tahun	Belanja Langsung	Belanja tidak Langsung
2016	70%	49%
2017	81%	44%
2018	84%	46%
2019	80%	41%
2020	91%	64%

Sedangkan Pada tahun 2017 Belanja Langsung sebesar Rp.3.545,77 dan belanja tak langsung sebesar Rp.1.948,65 dengan total belanja sebesar Rp.5.494,42 Persentase total belanja langsung yang digunakan sebesar 81% dan belanja tak langsung sebesar 44%. Pada tahun 2018 Belanja Langsung sebesar Rp.3.531,99 dan Belanja Tak Langsung sebesar Rp.1.919,66 dengan total belanja sebesar Rp.5.451,65 Persentase total belanja langsung yang digunakan sebesar 84% dan belanja Tak Langsung sebesar 46%. Dan Pada tahun 2019 Belanja Langsung sebesar Rp.4.058,75 dan belanja tak langsung sebesar Rp.2.075,90 dengan total belanja sebesar Rp.6.134,65 Persentase total belanja langsung yang digunakan sebesar 80% dan belanja tak langsung sebesar 41%. Kemudian pada tahun 2020 Belanja Langsung sebesar Rp.3.639,85 dan belanja tak langsung sebesar Rp2.549,91 dengan total belanja sebesar Rp.6.189,76 Persentase total belanja langsung yang digunakan sebesar 91% dan belanja tak langsung sebesar 64%.

#### Rasio Efisiensi Belanja

Pada tabel 4.27 dijelaskan bahwa rasio ini berguna untuk mengetahui kemampuan pemerintahan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan

pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan nilai efisiensi pada tahun 2016 sebesar 84%, nilai efisiensi pada tahun 2017 sebesar 80%, nilai efisiensi pada tahun 2018 sebesar 77%, nilai efisiensi pada tahun 2019 sebesar 82%, nilai efisiensi pada tahun 2020 sebesar 65%, Jika dilihat sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 nilai efisiensi kurang dari 100% maka penghematan anggaran berjalan dengan baik atau efisien.

Tabel 8. Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Persentase
2016	84%
2017	80%
2018	77%
2019	82%
2020	65%

#### Rasio Belanja terhadap PDRB

Pada tabel 4.28 dijelaskan bahwa Rasio Belanja PDRB Tahun 2016 sebesar 3%, Tahun 2017 sebesar 3%, Tahun 2018 sebesar 3%, Tahun 2019 sebesar 3%, Tahun 2020 sebesar 3%. Rasio PDRB cenderung tidak stabil yang mengakibatkan rendahnya pendapatan belanja suatu daerah. Ketidakstabilan PDRB mengakibatkan penurunan pada belanja daerah.

Tabel 9. Rasio Belanja terhadap PDRB

Tahun	Persentase
2016	3%
2017	3%
2018	3%
2019	3%
2020	3%

#### Pembahasan Hasil Analisis Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 – 2020 Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

#### Analisis Varians (Selisih) Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 sampai 2020 mengalami selisih kurang. Faktor dari penyebab selisih kurang adalah rendahnya Belanja Modal sebagai akibat dari rendahnya realisasi Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan dan Irigasi serta Aset Tetap Hal ini menunjukkan bahwa adanya selisih kurang (bersaldo negatif) realisasi belanja yang tidak melebihi anggaran, dengan kata lain selisih yang menguntungkan (favourable variance).

### Analisis Pertumbuhan Belanja

Tingkat pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Medan pada tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2016 mengalami peningkatan dan penurunan dalam persentasinya. Pertumbuhan Belanja 2016 sebesar 19% bersaldo positif, Pertumbuhan 2017 sebesar -3% bersaldo negatif. Pertumbuhan 2018 sebesar -4% negatif, Pertumbuhan 2019 meningkat sebesar 20% positif, Pertumbuhan 2020 menurun sebesar -21% namun tetap baik karena berbaldo negative. Persentasi setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan, dikatakan bahwa pertumbuhan belanja tidak stabil. Pada tahun 2019 peningkatan paling besar sebesar 20%, rasio tersebut berada pada pertumbuhan yang sangat baik dibandingkan tahun 2016, 2017, 2018, 2020. Pertumbuhan belanja tahun 2016 sampai dengan 2020 meningkat terkecuali di tahun 2017, 2018 dan 2020.

Tabel 10. Analisis Pertumbuhan Belanja

2016	842	0,185961819	19%
2017	-129,40	-0,028595232	-3%
2018	-180,83	-0,041136714	-4%
2019	845,73	0,0200647687	20%
2020	-1067,48	-0,210933996	-21%

Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Medan tidak merealisasikan belanja Modal dengan baik dan mengurangi porsi belanja yang dialokasikan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah seperti pembangunan dalam bidang infrastruktur dan ekonomi serta sumber daya manusia dan bantuan pendidikan, yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan. Persentase peningkatan tiap tahun naik turun, hal ini menandakan bahwa kualitas output kegiatan pada tahun 2016 hingga 2020 belum terlaksana dengan maksimal.

### Keserasian Belanja

#### Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja

Rasio Belanja per Fungsi Pemerintah Kota Medan, untuk menilai Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan ketentuan Undang – undang Dasar yang mengamanatkan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, serta kecukupan porsi anggaran lainnya. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 porsi untuk sektor pendidikan telah memenuhi anggaran sebesar 20% dari total APBD. Serta kecukupan untuk porsi sektor lainnya.

Tabel 11. Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja

Tahun	Persentase
2016	1.583,80
2017	4.395,69

2018	4.215,53
2019	5.060,86
2020	5.128,19

### Belanja Operasi

Belanja Operasi mengalami peningkatan dari 71,27% di Tahun 2016 menjadi 30% di Tahun 2017 sehingga mengalami peningkatan rasio sebesar 35%, artinya porsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi pada Tahun 2017 lebih besar dibanding porsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi Tahun 2016. Ditahun 2018 menurun menjadi 39% dan mengalami kenaikan sebesar 41% di tahun 2019, dan sedikit meningkat menjadi 49% Tahun 2020. Dan rata - rata persentase rasio keserasian pada belanja operasi sebesar 39% yang dikatakan cukup serasi. Belanja Operasi Pemerintah Kota Medan belum di katakan serasi karena hasil perhitungan di bawah 60 - 80%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan pemerintah Kota Medan maka akan meningkatnya total belanja operasi.

Tabel 12. Belanja Operasi

Tahun	Persentase
2016	1.368,74
2017	1.542,06
2018	1.642,08
2019	2.052,71
2020	1.949,44

### Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kota Medan belum dikatakan serasi karena hasil perhitungan berada di bawah 60 - 80%. Belanja Modal Tahun 2016 sebesar 26% dan naik Tahun 2017 sebesar 31%, kemudian menurun Tahun 2018 sebesar 28%, kembali menurun Tahun 2019 sebesar 24%, meningkat Tahun 2020 sebesar 25%. Rata - rata persentase rasio keserasian pada belanja modal sebesar 27% yang dikatakan kurang serasi. Dalam total belanjanya lebih besar dialokasikan untuk belanja yang terkait program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Secara umum proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah antara 19% - 45%. Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 yang memiliki rata - rata belanja modal sebesar 27%.

Tabel 13. Belaja Modal

Tahun	Persentase
2016	1.190,61
2017	1.352,89
2018	1.168,57
2019	1.232,12
2020	1.006,20

Hal ini menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Medan masih diprioritaskan untuk belanja operasi sehingga belanja modal relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata rasio operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata – rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya belanja pegawai untuk belanja gaji, tunjangan PNS Daerah, Tambahan penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD, Biaya pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS dan uang Lembur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan lebih pada pengeluaran – pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas.

### Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung pada Pemerintah Kota Medan dihitung dengan menggunakan rasio belanja langsung dan tak langsung, menunjukkan bahwa belanja langsung pada tahun 2016 sampai tahun 2020 lebih besar dibandingkan dengan belanja tak langsung. Persentase total belanja langsung yang digunakan tahun 2016 sebesar 70% dan belanja tak langsung sebesar 49%. Belanja langsung yang digunakan tahun 2017 sebesar 81% dan belanja tak langsung sebesar 44%. Kemudian belanja langsung yang digunakan tahun 2018 sebesar 84% dan belanja tak langsung sebesar 46%. Belanja langsung yang digunakan tahun 2019 sebesar 80% dan belanja tak langsung sebesar 41%. Dan pada tahun 2020 Belanja langsung yang digunakan sebesar 91% dan belanja tak langsung sebesar 64%.

Tabel. 14. Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tahun	Belanja Langsung	Belanja tidak Langsung
2016	3.175,03	2.204,29
2017	3.545,77	1.948,65
2018	3.531,99	1.919,66
2019	4.058,75	2.075,90
2020	3.639,85	2.549,91

### Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi pada tahun Anggaran 2016 menunjukkan sebesar 84%, pada tahun Anggaran 2017 menurun menjadi 80% dan pada tahun Anggaran 2018 menurun menjadi 77% sedangkan Pada tahun Anggaran 2019 kembali naik menjadi 82%. Dan kemudian pada tahun Anggaran 2020 menurun menjadi 65%.

Tabel 15. Analisis Efisiensi Belanja

Tahun	Persentase
2016	84%
2017	80%
2018	77%
2019	82%

2020	65%
------	-----

Jika dibandingkan dengan Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2016 maka Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2020 mengalami peningkatan rasio sebesar 9,17% artinya pada tahun 2016 belanja Pemerintah Kota Medan relatif lebih efisien. Peningkatan Rasio Efisiensi Belanja ini disebabkan total realisasi Belanja Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2020.

Pemerintah Kota Medan berada pada predikat kurang dari 100%.Maka dikatakan kategori efisien dalam penggunaan anggaran belanja daerah yang dimiliki sehingga tercapai penghematan anggaran.Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengelolaan anggaran belanja Pemerintah Kota Medan. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, rata rata rasio efisiensi belanja daerah Pemerintah Kota Medan sudah mampu meminimalkan penggunaan sumber daya (anggaran belanja daerah) yang ada tetapi belum maksimal dalam penggunaan sumber anggaran yang dimiliki.

#### Rasio Belanja Terhadap PDRB

Efektivitas Belanja Daerah terhadap PDRB Pemerintah Kota Medan pada tahun 2016 sebesar 3%. Pada tahun 2017 sebesar 3%.Pada tahun 2018 sebesar 3%.Pada tahun 2019 sebesar 3%.Pada tahun 2020 sebesar 3%.Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB cenderung stabil. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 persentase rasio belanja terhadap PDRB adalah sama.

Rata - rata rasio belanja daerah terhadap PDRB Pemerintah Kota Medan sebesar 3% yaitu stabil.Hal ini dikatakan bahwa rasio belanja terhadap PDRB tiap tahun berdampak pada pengeluaran belanja pemerinthan. Karena menurunnya PDRB maka pendapatan akan menurun dan alokasi untuk belanja daerah juga menurun.

Tabel 16. Rasio Belanja Terhadap PDRB

Tahun	Persentase
2016	3%
2017	3%
2018	3%
2019	3%
2020	3%

#### Pembahasan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel, dapat diketahui pada tahun 2016 sebesar Rp.184 809,04 milyar. Selanjutnya, pada tahun 2017 PDRB sebesar Rp.203 035,74 milyar atau naik sebesar 9,86% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 PDRB sebesar Rp.222 483,24 milyar atau naik sebesar 9,57 % dari tahunsebelumnya. Pada tahun 2019 PDRB sebesar Rp.241 482,35 milyar atau naik sebesar 8,53% dari tahunsebelumnya. Pada tahun 2020 PDRB sebesar Rp.242 198,24 milyar atau naik sebesar 0,29% dari tahunsebelumnya. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65%.

Tabel 17. Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	PDRB (Milyar Rp)	Perkembangan (%)
2016	184 809,04	
2017	203 035,74	9,86%
2018	222 483,24	9,57%
2019	241 482,35	8,53%
2020	242 198,24	0,29%
Rata-rata perkembangan		5,65%

Sumber data : BPS kota Medan

#### IV. Kesimpulan Dan Saran

##### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Varians Belanja Pemerintah Kota Medan dikatakan efisien dan efektif karena pada realisasi belanja tidak melebihi anggaran. Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Medan pada tahun 2016 sampai 2020 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Menunjukkan bahwa kinerja dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Medan pada tahun 2016 sampai 2020 dikatakan mampu melakukan penghematan anggaran belanja dengan baik dan efisiensi kurang dari 100%, hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase mencapai 78% dengan kriteria serasi.

##### Saran

Adapun Saran yang dapat berikan kepada pihak instansi khususnya Pemerintah Kota Medan sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan rasio efisiensi belanjanya di masa yang akan datang dalam penggunaan anggaran belanja daerah yang dimiliki dan memaksimalkan penggunaan sumber anggaran yang dimiliki.
2. Memperhatikan pertumbuhan belanjanya dengan menyeimbangkan dengan laju pertumbuhan pendapatan agar meningkat dimasa yang akan datang.
3. Mengelola anggaran belanja operasi dan modal yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan adanya kinerja yang baik dalam mengelola anggaran maka akan terjadi produktifitas dan efisiensi belanja yang lebih baik.
4. Memprioritaskan untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan dan seimbang belanja untuk pembangunan daerah antara belanja untuk pemerintahan (Belanja Tak Langsung) dan belanja untuk pembangunan (Belanja Langsung)
5. Memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

**V. Daftar Pustaka**

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*, Bapekki Depkeu.
- Amins, Achmad. 2012. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Laksbang Press Indo. Yogyakarta
- Ariefiansyah, Ryan dan Miyosi Margi Utami. 2012. *Membuat Laporan Keuangan Gampang*, Dunia Cerdas, Jakarta
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2010. *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2011. *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013. *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014. *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015. *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2016. *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan*.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Dadang Suwanda dan Hendri Santosa. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada SAP*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dina, Aryanto. 2012. *Penganggaran Sektor Publik, Modul*. Palembang: Universitas Sriwijaya.